



# PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT KELASIB

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2020



PENGADILAN NEGERI  
SUNGAILIAT

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT  
NOMOR : W7.U2/ 6/5 /SK/KP01.2/2/2021

TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)  
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

**KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

- Menimbang
- : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020, tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
  - b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2018;
  - c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b diatas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) pada Pengadilan Negeri Sungailiat;
  - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan tersebut.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
  - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
  - 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020.
- Kedua : Tim bertugas menghimpun laporan-laporan yang relevan dan menyusunnya sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada Tanggal : 5 Februari 2021

**KETUA**  
**PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**



Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat  
 Nomor : W7.U2/145/KP 01.2/2/2021  
 Tanggal : 5 Februari 2021

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TAHUN 2020**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI
1	FATIMAH, SH., MH. NIP. 19710205 199603 2002	KETUA	PELINDUNG
2	ZULKIFLI, SH., MH. NIP. 19660809 199603 1002	WAKIL KETUA	PENANGGUNG JAWAB
3	MUHAMMAD HADLI, SH., MH. NIP. 19670515 199003 1007	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB
4	ROSMALA SARI, SE NIP. 19810704 200604 2004	SEKRETARIS	KESEKRETARIATAN
5	EGI DESIKA, SH NIP. 19861217 201101 1007	Plt. PANMUD PIDANA	KOORDINATOR BIDANG PIDANA
6	REZA ARDHAFI, SH., MH. NIP. 19850201 200912 1003	PANMUD PERDATA	KOORDINATOR BIDANG PERDATA
7	NOFRIANDI, SH NIP. 19811225 200904 1006	PANMUD HUKUM	KOORDINATOR BIDANG HUKUM
8	DEWI APRILIA PUSPITA NINGRUM, S.Kom NIP. 19860428 200904 2006	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	KOORDINATOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
9	MERIE LHUVANTIE, SE NIP. 19830504 200904 2007	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
10	JOVAN MEIRIL, ST 19830521 201101 1005	KASUBBAG PTIP	KOORDINATOR BIDANG PTIP



# PENGANTAR

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemicu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat. Kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sungailiat, 24 Februari 2021

Ketua

FATIMAH

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2020, merupakan LkjIP tahun pertama sejak dikeluarkannya Renstra Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2020-2024.

Dalam LKjIP ini tertuang hasil review terhadap indikator kinerja utama dari Pengadilan Negeri Sungailiat dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2020-2024.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Sungailiat adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian *out put* dan *out come* kinerja lembaga peradilan dipengaruhi unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat.

Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2020 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020 %	REALISASI		CAPAIAN		
		JUMLAH	%			
<b>SASARAN STRATEGIS I</b>						
<b>MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA</b>						
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100	15	100	100		
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	94	608	95,57	102,18		
Persentase penurunan sisa perkara :	20	-	-	0		
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :						
Banding	95	558	96,54	101,62		
Kasasi	96	599	98,51	102,61		
PK	96	605	99,50	103,65		
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	15	1	33,33	222,2		
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	-	91,40	101,55		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				104,23		
<b>SASARAN STRATEGIS II</b>						
<b>PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA</b>						
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	608	100	100		
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	3	12	120		
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	33	100	100		

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100	608	100	100
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				<b>105</b>
<b>SASARAN STRATEGIS III</b>				
<b>MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN</b>				
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	-	100	100
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				<b>100</b>
<b>SASARAN STRATEGIS IV</b>				
<b>PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN</b>				
Persentase permohonan putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	40	3	37.5	<b>93.75</b>
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				<b>93.75</b>

# DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	I
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi .....	3
D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	6
E. Sistematika Penyajian .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT	15
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2020 .....	16
D. PENETAPAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2020 .....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	19
BAB IV PENUTUP .....	54

# DAFTAR TABEL

<b>Table 1</b> Sistematika Penyajian .....	8
<b>Table 2</b> Hubungan Antar Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran dan IKU .....	14
<b>Table 3</b> Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 .....	16
<b>Table 4</b> Rencana Kinerja Tahun 2020 .....	17
<b>Table 5</b> Penetapan Kinerja .....	18
<b>Table 6</b> Capaian Kinerja Organisasi .....	20
<b>Table 7</b> Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti .....	21
<b>Table 8</b> Sisa Perkara .....	22
<b>Table 9</b> Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan .....	22
<b>Table 10</b> Jumlah Perkara Tahun 2018 s/d 2020 .....	23
<b>Table 11</b> Keadaan Penyelesaian Perkara Setiap Bulan Sepanjang Tahun 2020 .....	25
<b>Table 12</b> Pencapaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018 s/d 2020 .....	26
<b>Table 13</b> Sisa Perkara Tahun Sebelumnya .....	26
<b>Table 14</b> Sisa Perkara Tahun Berjalan .....	27
<b>Table 15</b> Pencapaian Indikator Kinerja Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 s/d 2020 .....	27
<b>Table 16</b> Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding .....	28
<b>Table 17</b> Pencapaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2018 s/d 2020 .....	29
<b>Table 18</b> Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi .....	30
<b>Table 19</b> Pencapaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018 s/d 2020 .....	31
<b>Table 20</b> Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK .....	31
<b>Table 21</b> Pencapaian Indikator Kinerja Perakra Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2018 s/d 2020 .....	32
<b>Table 22</b> Pencapaian Indikator Kinerja Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi Tahun 2018 s/d 2020 .....	33
<b>Table 23</b> Peringkat Variabel IKM Semester I .....	35
<b>Table 24</b> Peringkat Variabel IKM Semester II .....	35
<b>Table 25</b> Pencapaian Indikator Kinerja Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2018 s/d 2020 .....	36
<b>Table 26</b> Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Meningkatnya Penyelesaian Perkara .....	37
<b>Table 27</b> Jumlah Putusan Yang Diterima Tepat Waktu .....	38
<b>Table 28</b> Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu .....	38
<b>Table 29</b> Jumlah Perkara Mediasi Yang Berhasil .....	39
<b>Table 30</b> Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Meningkatnya Penyelesaian Perkara .....	39
<b>Table 31</b> Jumlah Perkara Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap .....	40
<b>Table 32</b> Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Meningkatnya Penyelesaian Perkara .....	41
<b>Table 33</b> Jumlah Amar Putusan Yang Diupload .....	42
<b>Table 34</b> Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Amar Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Diakses Secara Online Dalam Waktu Maksimal 1 Hari Kerja Sejak Diputus .....	43
<b>Table 35</b> Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan .....	45
<b>Table 36</b> Perkara Posbankum .....	45
<b>Table 37</b> Jam Layanan Posbankum .....	46

<b>Table 38</b> Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum tahun 2018 s/d 2020 .....	46
<b>Table 39</b> Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan .....	47
<b>Table 40</b> Pencapaian Indikator Persentase Permohonan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) .....	48
<b>Table 41</b> Anggaran Awal dan Revisi .....	49
<b>Table 42</b> Revisi Anggaran DIPA 099024 .....	50
<b>Table 43</b> Revisi Anggaran DIPA 099235 .....	50
<b>Table 44</b> Realisasi Anggaran Tahun 2020 .....	50
<b>Table 45</b> Detail Realisasi Anggaran Tahun 2020 DIPA 099024 .....	52
<b>Table 46</b> Detail Realisasi Anggaran Tahun 2020 DIPA 099235 .....	53

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gbr. 1</b> Grafik Capaian Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2018 s/d 2020 -----	23
<b>Gbr. 2</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu -----	26
<b>Gbr. 3</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 s/d 2020 -----	28
<b>Gbr. 4</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2018 s/d 2020-----	29
<b>Gbr. 5</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi-----	31
<b>Gbr. 6</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2018 s/d 2020-----	32
<b>Gbr. 7</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi Tahun 2018 s/d 2020-----	34
<b>Gbr. 8</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2018 s/d 2020-----	36
<b>Gbr. 9</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Isi Putusan Yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu -----	38
<b>Gbr. 10</b> Grafik Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi -----	40
<b>Gbr. 11</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Persentase Berkas Yang Olajukan Banding, Kasasi, dan PK Yang Disampaikan Secara Lengkap Tahun 2018 s/d 2020 -----	41
<b>Gbr. 12</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Amar Putusan Perkara Yang Diupload Dalam Website -----	43
<b>Gbr. 13</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2018 s/d 2020 -----	47
<b>Gbr. 14</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Persentase Permohonan Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2018 s/d 2020 -----	48

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tidak terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Sungailiat dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai organisasi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungailiat mempunyai visi ***"Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungailiat yang Agung"***.

Sebagai Organisasi Kantor Pengadilan Negeri Sungailiat harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Pengadilan Negeri Sungailiat dalam melaksanakan tugasnya baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, setiap Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat dan benar.

Program-program yang ada di Pengadilan Negeri Sungailiat diprioritaskan yang terkait dengan akses publik sehingga dengan program-program tersebut di Pengadilan Negeri Sungailiat akan tercipta :

1. Transparansi pengadilan dan akuntabelnya Pejabat Peradilan;
2. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan dan akses publik;
3. Perbaikan tata kerja dan pengembangan sumber daya manusia.

## **B. Tugas dan Fungsi**

### **1. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri.**

Pengadilan Negeri bertugas dan berwewenang :

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.

## 2. Fungsi :

Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai lembaga peradilan di tingkat pertama di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menjalankan/fungsi utama lembaga yaitu :

### a. Fungsi Peradilan

Pengadilan Negeri Sungailiat merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan tingkat pertama untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Bangka Belitung diterapkan secara adil dan benar.

### b. Fungsi Pengawasan

1. Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan dapat diselenggarakan dengan seksama dan dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara.
2. Ketua Pengadilan Negeri Sungailat juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim-Hakim.

## C. Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Sungailiat merupakan Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. **Ketua Pengadilan Negeri** tugas pokok dan fungsinya adalah : Pemimpin Pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. **Wakil Ketua Pengadilan Negeri** tugas pokok dan fungsinya adalah : Mewakili Ketua Pengadilan Negeri dalam hal ini merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri.
3. **Hakim** tugas pokok dan fungsinya adalah : Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri menyusun Program Kerja Jangka Panjang dan jangka Pendek, serta melaksanakan Pengawasan Bidang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat.
4. **Panitera** tugas pokok dan fungsinya adalah : Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
5. **Panitera Muda Perdata** tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan megkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian Kepaniteraan Perdata serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera.
6. **Panitera Muda Pidana** tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian Kepaniteraan Pidana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera.
7. **Panitera Muda Hukum** tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian Kepaniteraan Hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera.

- 8. Sekretaris** tugas pokok dan fungsinya adalah : Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
- 9. Kasubbag Umum dan Keuangan** tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian Umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 10. Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA** tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian Kepegawaian dan ORTALA serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 11. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 12. Panitera Pengganti** tugas pokok dan fungsinya adalah : Mendampingi dan membantu Hakim dalam menyidangkan perkara dan membuat berita acara, membuat instrumen sidang, dan menyerahkan berkas perkara yang telah selesai kepada Panitera Muda Hukum serta bertanggung jawab kepada Panitera.
- 13. Jurusita/Jurusita Pengganti** tugas pokok dan fungsinya adalah : Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab kepada Panitera.

## D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dalam rangka perumusan rencana strategis, maka Pengadilan Negeri Sungailiat perlu mengadakan analisa mengenai kondisi saat ini. Kerangka (*framework*) pemikiran dalam menilai, mengevaluasi serta mengukur kondisi tersebut mengadopsi kerangka pemikiran yang dirumuskan oleh Mahkamah Agung yaitu tentang "Pengadilan yang Ideal". Mengacu dari hal tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat merumuskan delapan aspek/bidang yang merupakan hasil *breakdown* dari konsep "Pengadilan yang Ideal" tersebut, yaitu (1) aspek proses peradilan/alur berperkara, (2) aspek sumber daya aparatur peradilan, (3) aspek pembinaan dan pengawasan, (4) aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan, (5) aspek sarana dan prasarana, (6) aspek pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan, (7) aspek keterjangkauan pelayanan peradilan, dan (8) kepercayaan masyarakat.

Aspek butir (1) sampai butir (5) merupakan tinjauan penilaian tentang "Pengadilan yang Ideal" secara internal, sedangkan pada aspek butir (6) sampai butir (8) merupakan penilaian secara eksternal.

Masing-masing aspek yang dijadikan sebagai kriteria pengukuran, dibagi lagi menjadi sub-sub aspek yang diekspresikan dalam sejumlah pernyataan. Berikut adalah tinjauan lebih detil mengenai sub aspek yang dinilai sudah baik dan yang dinilai masih sangat perlu perbaikan.

ASPEK 1	PROSES PERADILAN/ALUR BERPERKARA
Baik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hakim memenuhi nilai-nilai pengadilan yang ideal</li><li>• Pemisahan peran dan tanggung jawab, hakim dan non hakim</li><li>• Sarana teknologi mendukung proses peradilan</li></ul>
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengukuran kualitas pelayanan dan putusan pengadilan</li></ul>
ASPEK 2	SUMBER DAYA APARATUR PERADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan SDM baik teknis yudisial maupun non teknis yudisial</li><li>• Sarana teknologi mendukung proses pengelolaan SDM</li><li>• Pelaksanaan sistem SKP</li></ul>
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penataan mekanisme kerja di setiap unit kerja</li><li>• Kejelasan peran dan tanggung jawab dalam setiap fungsi baik hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan</li><li>• Penataan SDM di masing-masing unit kerja sehingga pemanfaatan SDM yang ada dapat memenuhi kebutuhan kinerja yang akan dicapai</li></ul>
ASPEK 3	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan secara berkala</li><li>• Sistem manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi (SIWAS)</li></ul>
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reviu pedoman dan petunjuk teknis pengawasan</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien</li> <li>• Evaluasi penilaian kinerja</li> </ul>
<b>ASPEK 4</b>	<b>TERTIB ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PERADILAN</b>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjabaran tujuan, sasaran dalam program dan kegiatan yang tepat</li> <li>• Sarana teknologi mendukung proses komunikasi dan pemantauan kebijakan</li> <li>• Kedisiplinan dalam pemanfaatan sarana teknologi informasi yang ada</li> <li>• Keterbukaan pada visi, sasaran, program peradilan</li> </ul>
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya manajemen peradilan yang sistematis yang berorientasi kepada hasil (<i>Outcome</i>)</li> <li>• Penetapan strategi sesuai dengan tujuan</li> </ul>
<b>ASPEK 5</b>	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana gedung dan fasilitas perkantoran</li> <li>• Penyediaan sarana teknologi mendukung proses peradilan</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi bagi masyarakat pencari keadilan</li> </ul>
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi bagi masyarakat pencari keadilan</li> </ul>
<b>ASPEK 6</b>	<b>PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PARA PENCARI KEADILAN</b>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas mampu menindaklanjuti pengaduan dan permintaan dengan tanggung jawab</li> </ul>
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan informasi berkala tingkat kepuasan pengguna</li> </ul>
<b>ASPEK 7</b>	<b>KETERJANGKAUAN PELAYANAN PERADILAN</b>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya perkara yg terjangkau masyarakat</li> <li>• Akses yg mudah bagi masyarakat ke gedung pengadilan</li> <li>• Penerapan Aplikasi e-Skum</li> <li>• Penerapan Aplikasi e-Court</li> </ul>
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi bantuan hukum bagi pencari keadilan</li> </ul>
<b>ASPEK 8</b>	<b>KEPERCAYAAN MASYARAKAT</b>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan informasi proses perkara pengadilan</li> <li>• Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan, rencana, one day public</li> </ul>
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan informasi statistik pengawasan</li> </ul>

Bagan di atas memberikan arahan atau kunci-kunci lebih detil mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan penilaian sebagai pengadilan yang ideal. Bila membicarakan mengenai pengembangan atau perbaikan maka sub-sub aspek yang sudah baik, diperlukan program-program yang tujuannya adalah mempertahankan atau memperkuat (*polish the strength approach*). Sementara untuk sub-sub aspek yang masih perlu perbaikan (dinilai sebagai yang paling tidak memuaskan), maka diperlukan program-program perbaikan untuk bisa memenuhi harapan (*fill in the gaps approach*).

## **E. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat dalam tahun 2019, dengan bentuk sajian seperti berikut :

### **KATA PENGANTAR**

### **EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)**

### **DAFTAR ISI**

- BAB I** : **Pendahuluan**, menguraikan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta sistematika penyajian.
- BAB II** : **Perencanaan Kinerja**, terdiri dari Reviu Rencana Strategis 2020-2024, indikator kinerja utama 2020, rencana kinerja tahunan 2020, dan perjanjian kinerja yaitu dokumen penetapan kinerja tahun 2020.
- BAB III** : **Akuntabilitas Kinerja**, uraian dari pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
- BAB IV** : **Penutup**, kesimpulan dan saran.

Lampiran, struktur organisasi, Reviu Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2020 dan 2021, matrik rencana strategis tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2020, pengukuran kinerja, dan SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

*Table I Sistematika Penyajian*

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis 2020-2024

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020-2024. Renstra kali ini merupakan visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung RI berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sungailiat.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Sungailiat adalah:

***"Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungailiat yang Agung"***

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

#### **Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sungailiat**

##### **Visi**

Visi Pengadilan Negeri Sungailiat mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada kesimpulan Rakernas Mahkamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas berikutnya.

Penjelasan :

- a) Pengadilan Negeri menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum khususnya;
- b) Sungailiat, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Negeri;
- c) Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh Hakim dan Pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Visi merupakan harapan dan cita-cita Pengadilan Negeri Sungailiat khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

## **Misi**

Untuk Visi dari suatu organisasi, maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus dijalankan. Adapun Misi Pengadilan Negeri Sungailiat, sesuai dengan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sungailiat;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sungailiat;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sungailiat.

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”** dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut :

### **a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian instutional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuhan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan diseluruh Indonesia.

Selain kemandirian Instutional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan peradilan. Tujuan penyelenggaraan peradilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

### **b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya orientasi perbaikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung harus mempertimbangkan kepentingan

pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

**c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan pergerakan perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (yudisial).

Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, Pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain Pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung akan menitikberatkan peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-yudisial.

**d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengembangan kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan atau pun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

## **Tujuan dan Sasaran Strategis**

### **Tujuan**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Sungailiat akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

### **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek daripada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Sungailiat adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal
6. Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sungailiat dalam tahun 2020-2024. Karena sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, maka Pengadilan Negeri Sungailiat dalam tahun 2020 menetapkan sasaran yang dicapai dalam tahun 2020 dengan memperhatikan fungsi Pengadilan Negeri Sungailiat yang mendukung Lembaga Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran tersebut tercermin dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2020.

### **Program Utama dan Kegiatan Pokok**

**Program Utama** merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

**Kegiatan Pokok** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Sungailiat, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Ada 3 (tiga) Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Negeri Sungailiat mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program : **Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
- e. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

2. Program : **Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- a. Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

3. Program : **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

**Hubungan antara Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran, dan IKU**

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	I. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (sisa):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perdata</li><li>• Pidana</li></ul> <p>2. Persentase perkara yang diselesaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perdata</li><li>• Pidana</li></ul> <p>3. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perdata</li><li>• Pidana</li></ul> <p>4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Banding</li><li>2. Kasasi</li><li>3. Peninjauan Kembali</li></ol>

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	5. Percentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	1. Percentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu
				2. Percentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
				3. Percentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
				4. Percentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
				1. Percentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
				2. Percentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
				3. Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
				4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
				1. Percentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
				5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal
				1. Percentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti 2. Percentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan
				6. Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset
				1. Percentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

Table 2 Hubungan Antar Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran dan IKU

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

Pengadilan Negeri Sungailiat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, dan dapat dilihat sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : • Perdata • Pidana	Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : • Perdata • Pidana yang diselesaikan tepat waktu	• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: • Perdata • Pidana	Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.I = Sisa perkara tahun sebelumnya  Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Catatan: Diversi: anak pelaku kejadian tidak dianggap sebagai pelaku kejadian, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan  Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Catatan : ● Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ● Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan ( <i>zetting plaat</i> sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Catatan : ● PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ● Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

*Table 3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020*

## C. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat pada tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara sasaran yang menguraikan indikator kinerja dan target, serta program yang ingin dicapai. Realisasi masing-masing indikator kinerja sesuai dengan rincian yang terletak pada sumber daya manusianya yang berkualitas dan fasilitas yang telah disediakan.

Selanjutnya untuk menetapkan target kinerja tahun 2020, maka tidak terlepas dari Core Business Pengadilan Negeri Sungailiat yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara, sehingga apa saja yang harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan berimbang untuk menyelesaikan perkara yang masuk.

Rencana Kinerja Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2020 tertuang dalam bentuk Matrik Rencana Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

## RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI SUNGAILAT TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Putusan Perkara Pidana dan Perdata	550 Perkara	Rp. 162.310.000
		• Perdata						
		• Pidana						
		b. Persentase perkara :	94	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
		• Perdata						
		• Pidana						
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase penurunan sisa perkara:	10	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama tepat waktu		
		• Perdata						
		• Pidana						
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
		• Banding	95					
		• Kasasi	96					
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	• PK	96					
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	15	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90					
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	440 Orang / Jam Layanan		Rp. 44.000.000
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			

**Table 4 Rencana Kinerja Tahun 2020**

## D. PENETAPAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2020

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sungailiat, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

### Penetapan Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Sungailiat, sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : • Perdata • Pidana b. Persentase perkara : • Perdata • Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 94 10 95 96 96 15 90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 10 100 100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	40
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100
6.	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100

Table 5 Penetapan Kinerja

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini.

Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 Pengadilan Negeri Sungailiat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi *telah* dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan telah dicapai tahun 2020. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, masih belum mencapai target pencapaian 2020. Maka hal itu, akan diupayakan agar pencapaiannya dapat ditingkatkan pada tahun 2020.

Tahun 2020 Pengadilan Negeri Sungailiat menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 (dua belas) indikator kinerja.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	ANGGARAN
I.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : • Perdata • Pidana  b. Persentase perkara : • Perdata • Pidana yang diselesaikan tepat waktu  c. Persentase penurunan sisa perkara: • Perdata • Pidana	100 94 10	Rp. 162.310.000

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :		
		• Banding	95	
		• Kasasi	96	
		• PK	96	
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	15	
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100	
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10	
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100	
3	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	Rp. 44.000.000
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	40	

**Table 6 Capaian Kinerja Organisasi**

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun, Pengadilan Negeri Sungailiat telah memiliki sistem yang bisa mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga pada tahun 2020 fokus Pengadilan Negeri Sungailiat memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif.

Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut hanya bersifat penyempurnaan, agenda lanjutan pembaruan Pengadilan Negeri Sungailiat selama tahun 2020, meliputi:

1. Menjaga kesinambungan program penurunan tunggakan perkara, meliputi:
  - a. Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA No. 138/2009;
  - b. Redistribusi perkara yang berkategori perkara tunggakan;
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara melalui:
  - a. Membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara Panitera Pengganti dan Hakim.
3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi pengadilan (putusan PN Sungailiat, informasi status perkara).
  - a. Kontinuitas penyempurnaan direktorat putusan Pengadilan Negeri Sungailiat.

- b. Kontinuitas penyempurnaan sistem informasi status perkara (akurasi data, kelengkapan data).
- c. Memfungsikan secara maksimal situs web Pengadilan Negeri Sungailiat dengan membuka layanan seperti pengaduan online, polling/jajak pendapat masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam keterbukaan informasi melalui situs web.

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai Ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

### **SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaran penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sungailiat. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target 2020		Realisasi 2020		Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)
		Jml	%	Jml	%			
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :							
	a. Pidana:		100	15	100	100	100	100
	b. Perdata:							
2.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :							
	a. Pidana :		94	605	95.57	102.18	104.80	100.36
	b. Perdata :							
3.	Persentase penurunan sisa perkara :							
	a. Pidana :		20	-	-	0	275	224.25
	b. Perdata :							
4.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :							
	a. Banding	95	558	96.55	101.63		100.17	99.79
	b. Kasasi	96	600	98.52	102.62		101.29	102.32
	c. PK	96	606	99.50	103.65		103.62	103.70
5.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		15	1	33.33	222.2	0	68.8
6.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		90	-	91.40	101.55	100.41	101.53
Rata - Rata Capaian						104.23		

**Table 7 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

## 1. Penjelasan Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara tahun 2019 dan diselesaikan di tahun 2020.

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode sebelumnya

Tahun	Perkara Pidana			Perdata		
	Pidana Biasa	Pidana Anak	Pidana Cepat	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan
2019	8	0	0	7	0	0
Total	15 Perkara					

Table 8 Sisa Perkara

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan} \times 100\%}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \\
 & \frac{15 \times 100\%}{15} \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 jumlah sisa perkara yang diselesaikan sebanyak 15 perkara yang merupakan perkara sisa tahun 2019 yang belum terselesaikan dan persentase sisa perkara yang diselesaikan sepanjang tahun 2020 sebesar 100 %.

Capaian kinerja tahun 2020 untuk indikator ini sebesar :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Persentase sisa perkara yang diselesaikan} \times 100}{\text{Target}} \\
 & \frac{100 \times 100}{100} \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian Kinerja dari tahun 2018 s/d 2020 untuk indikator Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target 2020 %	Realisasi 2020		Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)
		Jml	%			
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	15	100	100	100	100

Table 9 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan  
Tahun 2018 s/d 2020



Gbr. 1 Grafik Capaian Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2018 s/d 2020

*"Tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena jumlah sisa perkara pada tahun sebelumnya harus diselesaikan pada tahun berjalan."*

## 2. Penjelasan Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa tahun sebelumnya di tambah perkara yang masuk tahun ini). Indikator ini untuk mengukur perkara yang diputus sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yaitu 5 (lima) bulan.

Tahun	Saldo Awal	Perkara Masuk	Perkara Minutasi
2020	15	618	608
2019			
2018			

Table 10 Jumlah Perkara Tahun 2018 s/d 2020

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

Jml perkara yang diselesaikan X 100%

Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

$608 \times 100\%$

633 (saldo awal dan perkara yang masuk)

$= 96.05\%$

- **Rasio penyelesaian perkara**, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan putus. Artinya Pengadilan Negeri Sungailiat dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya 100 % atau melebihi dari target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan masih adanya tunggakan perkara tiap tahunnya.
- Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Sungailiat menerima perkara sebanyak :
  - Pidana Biasa 476 Perkara
  - Pidana Khusus Anak 22 Perkara
  - Pidana Cepat 6 Perkara
  - Pidana Pra Peradilan 1 Perkara
  - Pidana Singkat 1 Perkara
  - Perdata Gugatan 53 Perakra
  - Perdata Gugatan Sederhana 12 Perkara
  - Perdata Permohonan 47 Perkara dan
  - Sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 15 perkara

Jadi jumlah beban perkara yang ditangani sebanyak 633 perkara, dengan jumlah perkara yang putus dan minutasi sebanyak 608 Perakra, rasio penyelesaian perkara sebesar 96.05 %

Capaian kinerja dari Indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Realisasi} \times 100}{\text{Target}} = \frac{96.05 \times 100}{94} = \underline{\underline{102.18 \%}}$$

Bulan	Perkara Pidana																				
	Pidana Biasa				Pidana Anak				Pidana Cepat				Pidana Singkat				Pidana Pra Peradilan				
	Sisa Lalu	Masuk	Minutasi	Sisa	Sisa Lalu	Masuk	Minutasi	Sisa	Sisa Lalu	Masuk	Minutasi	Sisa	Sisa Lalu	Masuk	Minutasi	Sisa	Sisa Lalu	Masuk	Minutasi	Sisa	
Januari	6	27	12	21	2	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
Feb	21	57	29	49	5	0	3	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maret	49	39	55	33	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
April	33	17	34	16	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mei	16	36	28	24	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Juni	24	39	44	19	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
Juli	19	71	47	43	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agustus	43	39	37	45	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
September	45	55	68	32	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oktober	32	34	34	32	2	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
November	32	42	42	32	3	6	4	5	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Desember	32	20	41	11	5	2	5	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>11</b>	476	471		<b>2</b>	22	22		<b>0</b>	6	6	0	<b>0</b>	1	1	0	<b>0</b>	1	1	0	

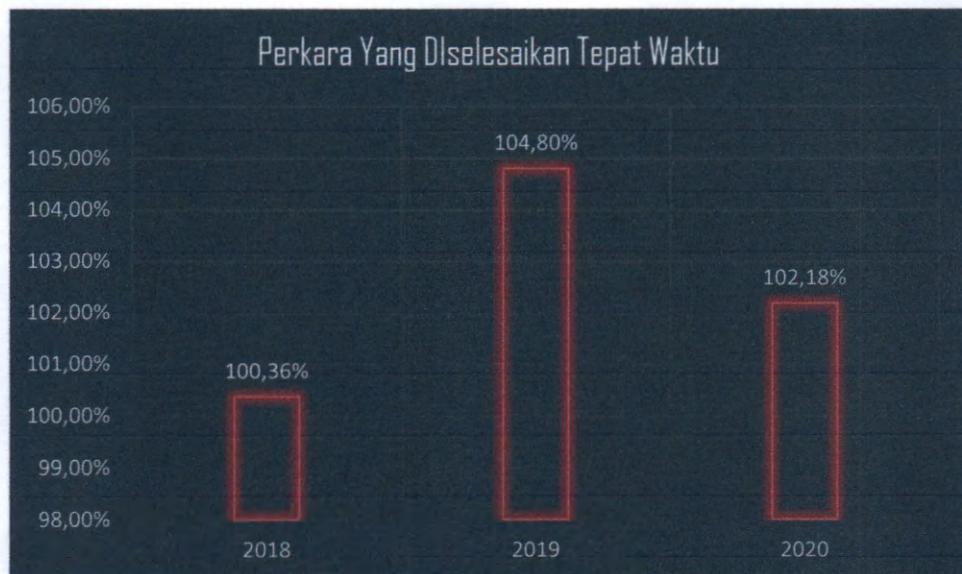
Bulan	Perdata													
	Gugatan				Gugatan Sederhana				Permohonan					
	Sisa Lalu	Masuk	Minutasi	Sisa	Sisa Lalu	Masuk	Minutasi	Sisa	Sisa Lalu	Masuk	Minutasi	Sisa		
Januari	7	5	1	11	0	0	0	0	0	6	5	1		
Feb	11	7	4	14	0	0	0	0	1	2	2	1		
Maret	14	4	5	13	0	0	0	0	1	8	8	1		
April	13	4	3	14	0	0	0	0	1	1	2	0		
Mei	14	3	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0		
Juni	14	2	1	15	0	0	0	0	0	1	0	1		
Juli	15	6	8	13	0	0	0	0	1	6	7	0		
Agustus	13	4	4	13	0	2	0	0	0	4	4	0		
September	13	6	5	15	2	5	5	2	0	7	5	2		
Oktober	15	4	8	11	2	5	5	2	2	6	6	2		
November	11	2	4	9	2	0	2	0	2	3	4	1		
Desember	9	6	4	11	0	0	0	0	1	3	3	1		
<b>Total</b>	<b>11</b>	53	49		<b>0</b>	12	12		<b>1</b>	47	46			

Table II Keadaan Penyelesaian Perkara Setiap Bulan Sepanjang Tahun 2020

### Capaian kinerja tahun 2018 s/d 2020 :

Indikator Kinerja	Target 2020 %	Realisasi 2020 Jml	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	608	96,05	102,18	104,80

Table 12 Pencapaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018 s/d 2020



Gbr. 2 Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018 s/d 2020

- Tercapainya target pada indikator kinerja **perkara yang diselesaikan** karena :
  1. koordinasi dengan pihak terkait lainnya mengenai jadwal sidang berjalan dengan baik, sehingga penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
  2. Disiplinnya Hakim dan PP beserta JS/JSP dalam melaksanakan sidang.

### 3. Persentase penurunan sisa perkara

Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya

Sisa Tahun Sebelumnya						
Perkara Pidana			Perkara Perdata			
Pidana Biasa	Pidana Anak	Pidana Cepat	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	
8	0	0	7	0	0	
15 Perkara						

Table 13 Sisa Perkara Tahun Sebelumnya

Sisa Tahun Berjalan								
Perkara Pidana					Perkara Perdata			
Pidana Biasa	Pidana Anak	Pidana Cepat	Pidana Singkat	Pra Peradilan	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	
11	2	0	0	0	11	1	0	25 Perkara

Table 14 Sisa Perkara Tahun Berjalan

Pada tahun 2019 jumlah sisa perkara sebanyak 15 perkara, sedangkan pada tahun **2020 sisa perkara sebanyak 25 perkara**.

$\frac{Tn.1-Tn}{Tn.1} \times 100\%$
$= \frac{15-25}{25} \times 100\%$
$= \frac{15}{25} \times 100\%$
$= 60\%$

Capaian kinerja pada indikator ini adalah :

$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$
$= \frac{15}{20} \times 100\%$
$= 75\%$
$= 0\%$

Capaian kinerja dari tahun 2018 s/d 2020

Indikator Kinerja	Target 2020 %	Realisasi 2020 %	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)
Persentase penurunan sisa perkara	100	0	0	275	224.25

Table 15 Pencapaian Indikator Kinerja Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 s/d 2020

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding X 100%  
Jumlah putusan

$\frac{587 \times 100}{608}$

**= 96.54 %**

Capaian kinerja tahun **2020** pada indikator ini adalah sebesar :

Realisasi x 100  
Target

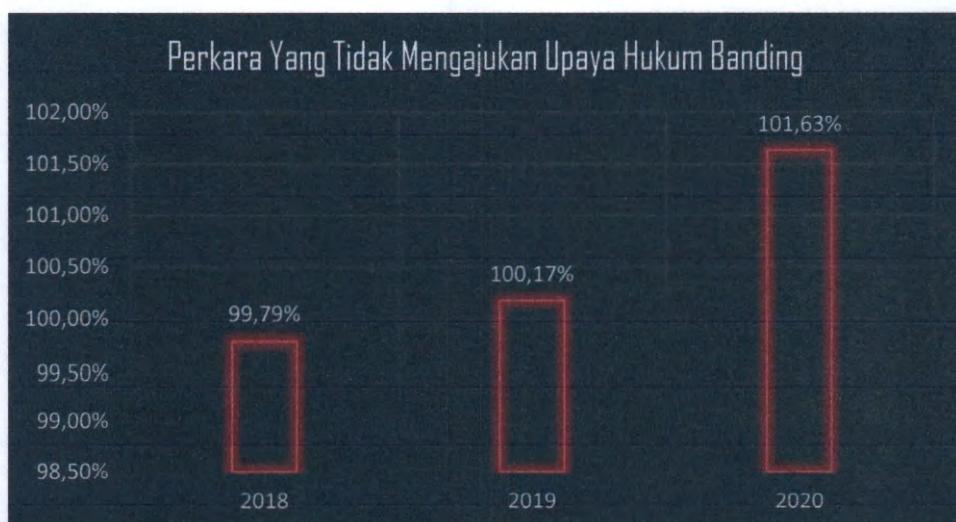
$\frac{96.54 \times 100}{95}$   
**= 101.62%**

Capaian kinerja dari tahun **2018 s/d tahun 2020**:

Pada tahun **2018** capaian kinerja indikator ini adalah sebesar **101.28 %**, tahun **2019** sebesar **100.17 %** dan tahun **2020** sebesar **101.63%**

Indikator Kinerja	Target 2020 %	Realisasi 2020		Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)
		Jml (Pkr)	%			
Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95	587	96.54	101.62	100.17	99.79

**Table 17** Pencapaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2018 s/d 2020



**Gbr. 4** Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2018 s/d 2020

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dari tahun ke tahun stabil dan menunjukkan bahwa meningkatnya akuntabilitas kinerja pada indikator ini.

Adapun hal-hal yang menyebabkan tercapainya target pada indikator ini adalah :

- Meningkatnya kepuasan terhadap putusan Hakim
- Putusan sudah sesuai dengan penerapan hukumnya dan mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

#### b. Penjelasan rasio perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus

No	Perkara	Putus Minutasi	Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	Pidana Biasa	471	7	464
2	Pidana Anak	22	-	22
3	Pidana Cepat	6	-	6
4	Pidana Pra Peradilan	1	-	1
5	Pidana Singkat	1	-	1
6	Gugatan	49	2	47
7	Gugatan Sederhana	12	-	12
8	Permohonan	46	-	46
<b>Jumlah</b>		<b>608</b>	<b>9</b>	<b>599</b>

*Table 18 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi*

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang putus dan sudah minutasi sebanyak 609 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 9 Perkara, *yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 600 perkara*.

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi X 100%  
Jumlah putusan

$$\frac{599 \times 100}{608} = 98.51\%$$

Capaian kinerja tahun 2020 pada indikator ini adalah sebesar :

Realisasi x 100  
Target

$$\frac{98.51 \times 100}{96} = 102.61\%$$

Capaian kinerja dari tahun 2018 s/d tahun 2020 pada indikator ini adalah sebesar :

Pada tahun 2018 capaian kinerja indikator ini adalah sebesar **102.32 %**, Tahun 2019 capaian kinerja indikator ini adalah sebesar **101.29 %** dan Tahun 2020 sebesar **102.62 %**

Indikator Kinerja	Target 2020 %	Realisasi 2020 Jml (Pkr)	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)
Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	96	599	98,51	102,61	101,29

Table 19 Pencapaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018 s/d 2020



Gbr. 5 Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018 s/d 2020

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dari tahun ke tahun stabil dan menunjukkan bahwa meningkatnya akuntabilitas kinerja pada indikator ini.

Adapun hal-hal yang menyebabkan tercapainya target pada indikator ini adalah :

1. Meningkatnya kepuasan terhadap putusan Hakim
2. Putusan sudah sesuai dengan penerapan hukumnya dan mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

#### c. Penjelasan rasio perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan jumlah perkara yang sudah diputus

No	Perkara	Putus Minutasi	PK	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
1	Pidana Biasa	471	2	469
2	Pidana Anak	22	-	22
3	Pidana Cepat	6	-	6
4	Pidana Pra Peradilan	1	-	1
5	Pidana Singkat	1	-	1
6	Gugatan	49	1	48
7	Gugatan Sederhana	12	-	12
8	Permohonan	46	-	46
	Jumlah	608	3	605

Table 20 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang putus sebanyak 608 perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebanyak 605 perkara.

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum PK X 100%  
Jumlah putusan

$$\frac{605 \times 100}{608} = 99.50 \%$$

Capaian kinerja tahun 2020 pada indikator ini adalah sebesar :

Realisasi x 100  
Target

$$\frac{99.50 \times 100}{96} = 103.65\%$$

Capaian kinerja dari tahun 2018 s/d tahun 2020 pada indikator ini adalah sebesar :

Pada tahun 2018 capaian pada indikator ini sebesar **103.70%** dan pada tahun 2019 capaian pada indikator ini sebesar **103.62%** dan tahun 2020 sebesar **103.65%**

Indikator Kinerja	Target 2020 %	Realisasi 2020 Jml (Pkr)	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)
<b>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK</b>	<b>96</b>	<b>605</b>	<b>99.50</b>	<b>103.65</b>	<b>103.62</b>

*Table 21 Pencapaian Indikator Kinerja Perakira Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2018 s/d 2020*



*Gbr. 6 Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2018 s/d 2020*

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pencapaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dari tahun ke tahun stabil.

Adapun hal-hal yang menyebabkan tercapainya target pada indikator ini adalah :

- Meningkatnya kepuasan terhadap putusan Hakim
- Putusan sudah sesuai dengan penerapan hukumnya dan mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

### 5. Penjelasan Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

"Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah."

Pada tahun 2020 Perkara Pidana Anak yang dapat diselesaikan melalui diversi yaitu 1 perkara dari 3 Perkara.

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversi} \times 100\% \\ & \text{Jumlah Perkara Pidana Anak} \\ & 1 \times 100\% \\ & 3 \\ & = 33.33\% \end{aligned}$$

Capaian kinerja tahun 2020 pada indikator ini adalah sebesar :

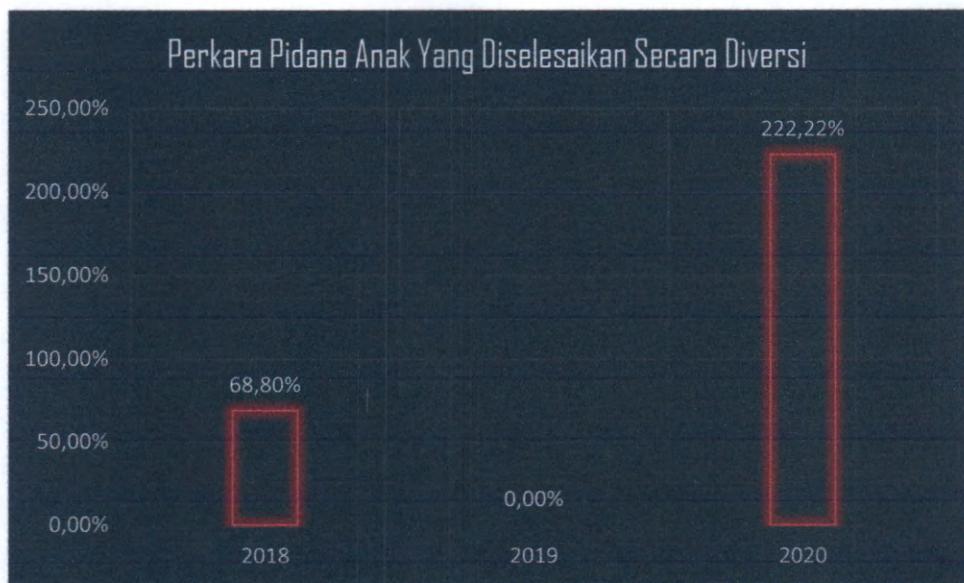
$$\begin{aligned} & \text{Percentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi} \times 100 \\ & \text{Target pencapaian} \\ & \frac{33.33 \times 100}{15} \\ & = 222.2 \% \end{aligned}$$

Capaian kinerja dari tahun 2018 s/d tahun 2020 pada indikator ini adalah sebesar :

Pada tahun 2018 capaian pada indikator ini sebesar **68.8%** dan pada tahun **2019** capaian pada indikator ini sebesar **0%** dan pada tahun **2020** sebesar **222.2 %**

Indikator Kinerja	Target 2020 %	Realisasi 2020 Jml	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)
Percentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversi	15	1	33.33	222.2	0

Table 22 Pencapaian Indikator Kinerja Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi Tahun 2018 s/d 2020



*Gbr. 7 Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi Tahun 2018 s/d 2020*

Adapun hal-hal yang menyebabkan tercapainya target pada indikator ini adalah :

- Hakim Fasilitator mediasi berhasil meyakinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian dan menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan.
- Adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai

## 6. Penjelasan Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik umum ataupun kebutuhan para pencari keadilan terhadap keputusan yang berkualitas

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungailiat memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan serta kebutuhan masyarakat para pencari keadilan atau pengguna Pengadilan yang memiliki karakteristik kebutuhan publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan tersebut merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan seharusnya Pengadilan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan

hal tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksaaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berikut Indeks Kepuasan Pencari Keadilan pada Pengadilan negeri Sungailiat berdasarkan laporan Kepaniteraan Hukum pada tahun 2020.

Proses penghitungan IKM pada tahun 2020 dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu semester I pada bulan Juli dan Semester kesua pada bulan Desember.

- Pada semester pertama (Januari-Juni 2020) jumlah responden sebanyak 100 orang dengan 9 variabel survey didapatkan hasil Kepuasan Masyarakat sebesar **91.39 %**

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,600	Sangat Baik	5
2.	Prosedur	3,667	Sangat Baik	3
3.	Waktu Pelayanan	3,600	Sangat Baik	5
4.	Biaya/Tarif	3,683	Sangat Baik	2
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,633	Sangat Baik	4
6.	Kompetensi Pelaksana	3,683	Sangat Baik	2
7.	Perilaku Pelaksana	3,667	Sangat Baik	3
8.	Prasarana, Sarana dan Kelengkapan	3,583	Sangat Baik	6
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,783	Sangat Baik	1

*Table 23 Peringkat Variabel IKM Semester I*

- Pada semester kedua (Juli-Desember 2020) jumlah responden sebanyak 100 orang dengan 9 variabel survey, dan didapatkan hasil Kepuasan Masyarakat sebesar **91.42 %**

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,590	Sangat Baik	7
2.	Prosedur	3,630	Sangat Baik	4
3.	Waktu Pelayanan	3,590	Sangat Baik	7
4.	Biaya/Tarif	3,690	Sangat Baik	2
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,580	Sangat Baik	9
6.	Kompetensi Pelaksana	3,620	Sangat Baik	5
7.	Perilaku Pelaksana	3,610	Sangat Baik	6
8.	Prasarana, Sarana dan Kelengkapan	3,640	Sangat Baik	3
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,960	Sangat Baik	1

*Table 24 Peringkat Variabel IKM Semester II*

- Dapat disimpulkan, bahwa Indeks Kepuasan Pelanggan pada Pengadilan Negeri Sungailiat pada tahun 2020 yaitu :

$$\begin{aligned}
 & \text{IKM Semester pertama + IKM Semester kedua} \\
 & \quad 2 \\
 & \underline{91.39 + 91.42} \\
 & \quad 2 \\
 & \underline{= 91.40 \%}
 \end{aligned}$$

Capaian kinerja tahun 2020 pada indikator ini sebesar :

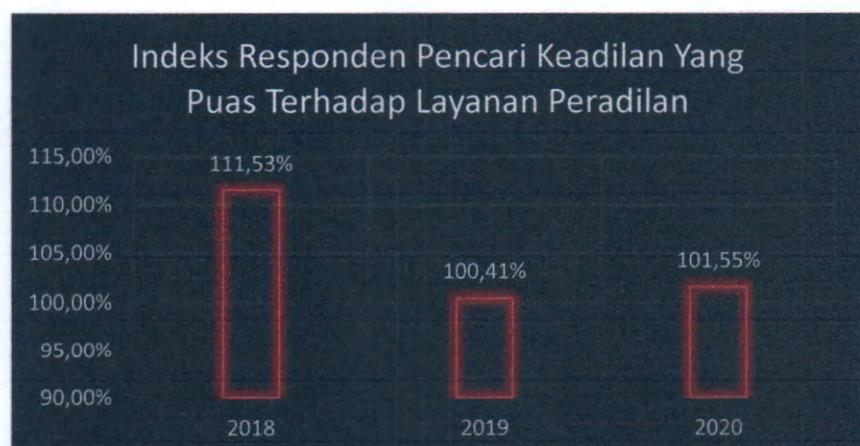
$$\begin{aligned}
 & \text{Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan} \times 100 \\
 & \text{Target} \\
 & \underline{91.40} \\
 & \underline{90} \\
 & \underline{= 101.55 \%}
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Sungailiat telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar **101.55 %**

Capaian kinerja dari tahun 2018 s/d tahun 2020 pada indikator ini sebesar :

Indikator Kinerja	Target 2020 %	Realisasi 2020 Jml	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)
<i>Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</i>	90	-	91.40	101.55	100.41

**Table 25** Pencapaian Indikator Kinerja Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2018 s/d 2020



**Gbr. 8** Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2018 s/d 2020

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat ini karena pada Pengadilan Negeri Sungailiat telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan petugas pelayanan yang memenuhi kualitas, serta meningkatnya sarana dan prasarana pada ruang pelayanan publik

## SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

Pada sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tertib administrasi perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sungailiat. Peningkatan tertib administrasi perkara ini di Pengadilan Negeri Sungailiat direalisasikan dengan menggunakan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini yang meliputi yaitu :

- 1) Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- 3) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- 4) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari.

Indikator tersebut menunjukkan *out come* dari kegiatan bimbingan dalam pelayanan penyelesaian perkara dan pembinaan para tenaga teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya oleh Pengadilan Negeri Sungailiat.

Semakin banyak berkas perkara yang dikembalikan ke pengadilan pengaju mengindikasikan pembinaan SDM terkait belum berjalan secara maksimal dalam mendukung pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pencari keadilan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target 2020		Realisasi 2020		Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)
		Jml	%	Jml	%			
1.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu		100	608	100	100	100	100
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi		10	3	12	120	100	83.33
3	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu		100	33	100	100	100	100
4	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus		100	608	100	100	100	100
Rata – rata Capaian						105		

Table 26 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Meningkatnya Penyelesaian Perkara

### 1. Penjelasan Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.

Jumlah Putusan	Jumlah Putusan Yang diterima tepat waktu
608 Perkara	608 Perkara

*Table 27 Jumlah Putusan Yang Diterima Tepat Waktu*

$$\begin{aligned}
 &\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu} \times 100\% \\
 &\text{Jumlah putusan} \\
 &\underline{608} \times 100\% \\
 &\underline{608} \\
 &= \underline{100\%}
 \end{aligned}$$

Capaian kinerja tahun 2020 pada indikator ini sebesar :

$$\begin{aligned}
 &\text{Realisasi} \times 100\% \\
 &\text{Target} \\
 &\underline{100} \times 100\% \\
 &\underline{100} \\
 &= \underline{100\%}
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 jumlah perkara putus sebanyak 608 perkara dan jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu sebanyak 608 perkara. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan target yang telah ditentukan maka Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu sepanjang tahun 2020 sebesar 100 %.

Capaian kinerja dari tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 pada indikator ini sebesar :

Indikator Kinerja	Target 2020 %	Realisasi 2020		Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)
		Jml	%			
<i>Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu</i>	100	608	100	100	100	100

*Table 28 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2018 s/d 2020*



**Gbr. 9** Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Isi Putusan Yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2018 s/d 2020

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pencapaian persentase lsi putusan yang diterima para pihak tepat waktu dari tahun ke tahun stabil.

Tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena setiap isi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat selalu dikirim dan diterima oleh para pihak tepat waktu.

## 2. Penjelasan Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Pada tahun 2020 jumlah perkara mediasi ada 25 perkara dengan 3 perkara yang berhasil di mediasi.

Jumlah Perkara Mediasi	Mediasi Berhasil
25	3

*Table 29 Jumlah Perkara Mediasi Yang Berhasil*

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi} \times 100\%}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} = \frac{3 \times 100\%}{25} = 12\%$$

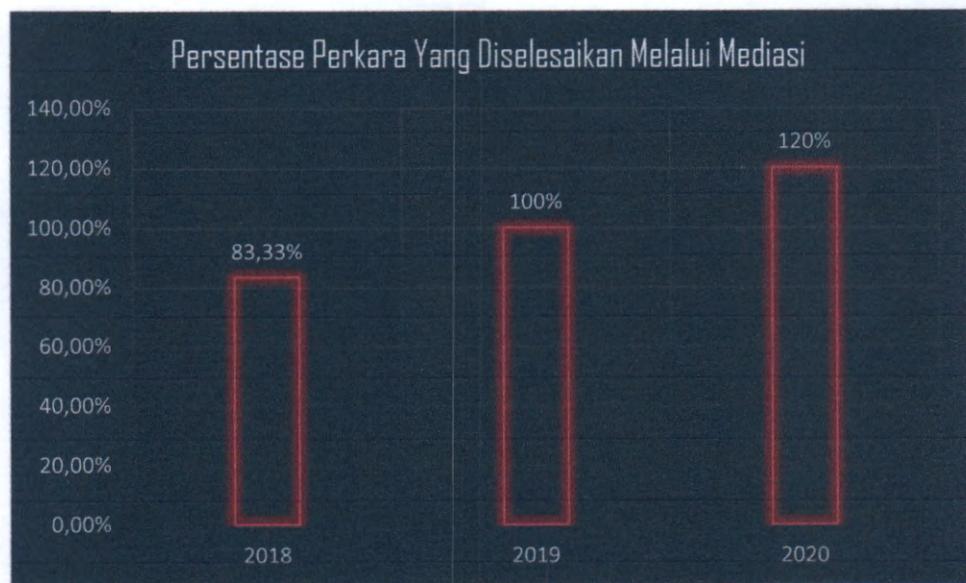
Capaian kinerja tahun 2020 pada indikator ini sebesar :

$$\frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}} = \frac{12 \times 100\%}{10} = 120\%$$

Capaian kinerja dari tahun 2018 s/d tahun 2020 pada indikator ini sebesar :

Indikator Kinerja	Target 2020 %	Realisasi 2020 Jml (Pkr)	Capaian 2020 %	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)
<i>Percentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi</i>	10	3	12	120	100

*Table 30 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Meningkatnya Penyelesaian Perkara*



**Gbr. 10** Grafik Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2 Percentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi  
Tahun 2018 s/d 2020

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pencapaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai.

### 3. Penjelasan rasio berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Berikut keadaan perkara Banding, Kasasi dan PK berdasarkan laporan kepaniteraan Pidana dan Perdata pada tahun 2020 :

No	Perkara Yang Banding, Kasasi dan PK	Banding	Kasasi	PK	Disampaikan Secara Lengkap
1	Pidana Biasa	15	7	2	24
2	Pidana Anak	1	-	-	1
3	Pidana Cepat	1	-	-	1
4	Pidana Pra Peradilan	-	-	-	-
5	Pidana Singkat	-	-	-	-
6	Gugatan	4	2	1	7
7	Gugatan Sederhana	-	-	-	-
8	Permohonan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	-
<b>Total</b>			<b>33</b>		<b>33</b>

**Table 31** Jumlah Perkara Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Rasio berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK dan disampaikan secara lengkap merupakan nilai rata-rata persentase berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

**Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap pada tahun 2020 ini adalah :**

Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap X 100%  
Jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK  
 $33 \times 100\%$   
33  
= 100 %

Tercatat jumlah berkas perkara Banding yang diajukan sebanyak 21 Perkara, Kasasi sebanyak 9 Perkara dan PK sebanyak 3 Perkara.

**Capaian kinerja tahun 2020 pada indikator ini sebesar :**

Realisasi X 100%  
Target  
 $100 \times 100\%$   
100  
= 100 %

**Capaian kinerja dari tahun 2018 s/d tahun 2020 pada indikator ini sebesar :**

Indikator Kinerja	Target 2020 %	Realisasi 2020 Jml	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)
<i>Percentase Berkas Perkara banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap</i>	100	47	100	100	100

*Table 32 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Meningkatnya Penyelesaian Perkara*



*Gbr. II Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Percentase Berkas Yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK Yang Disampaikan Secara Lengkap Tahun 2018 s/d 2020*

Secara administrasi perkara telah dilaksanakan dengan benar dan berdasarkan undang-Undang hukum acara yang berlaku, hal tersebut dibuktikan bahwa perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan Negeri Sungailiat setelah berkas dinyatakan lengkap dan telah diregister pada buku register untuk itu maka berkas segera dikirim, pada tahun 2020 ini semua berkas perkara sudah dikirim sehingga **capaian kinerjanya 100%** hal tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu **100%** artinya Pengadilan Negeri Sungailiat secara administrasi perkara, berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sudah berjalan dengan baik.

**4. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.**

Jumlah amar putusan yang diupload	Perkara Putus
608	608

*Table 33 Jumlah Amar Putusan Yang Diupload*

*Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus pada tahun 2020 ini adalah  $608 : 608 \times 100\% = 100\%$*

$$\begin{aligned} &\text{Jumlah amar putusan perkara yang di upload dalam website} \times 100\% \\ &\text{Jumlah perkara yang putus} \\ &\underline{608} \times 100\% \\ &608 \\ &= \underline{100\%} \end{aligned}$$

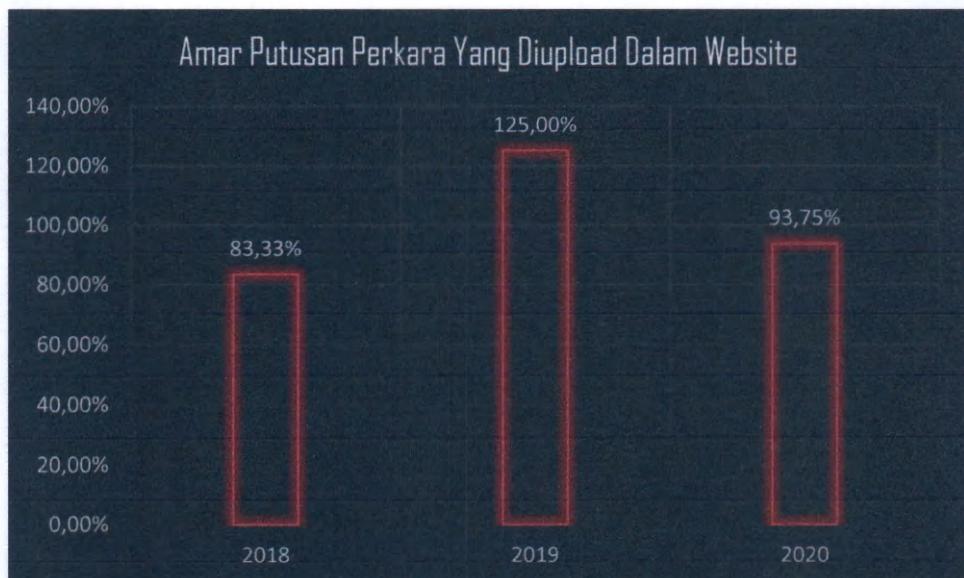
**Capaian kinerja tahun 2020 pada indikator ini sebesar :**

$$\begin{aligned} &\text{Persentase Jumlah amar putusan perkara yang di upload dalam website} \times 100\% \\ &\text{Target} \\ &\underline{100} \times 100\% \\ &100 \\ &= \underline{100\%} \end{aligned}$$

Capaian Kinerja dari tahun 2018 s/d tahun 2020 pada Indikator ini sebesar :

Indikator Kinerja	Target 2020 %	Realisasi Jml	Realisasi %	Capaian 2020 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %
<i>Percentase Jumlah amar putusan perkara yang diupload dalam website</i>	100	608	100	100	100	100

**Table 34** Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Amar Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Diakses Secara Online Dalam Waktu Maksimal 1 Hari Kerja Sejak Diputus



**Gbr. 12** Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Amar Putusan Perkara Yang Diupload Dalam Website Tahun 2018 s/d 2020

Perkara yang diusulkan atau ditargetkan di lakukan penyeleksian untuk dipublikasikan, perkara yang dipublikasikan dilihat dari berbagai aspek antara lain: peristiwa hukum, bobot pertimbangan hukum, amar putusan, dan lain-lain. Indikator Kinerja Utama merupakan upaya Pengadilan Negeri Sungailiat dalam meningkatkan pelayanan publik, adapun upaya-upaya Pengadilan Negeri Sungailiat untuk meningkatkan dan mendukung Indikator kinerja penyediaan informasi di pengadilan.

Dukungan teknologi informasi yang memadai, dibutuhkan kesiapan dan kapabilitas instansi dalam membangun sebuah sistem informasi yang dapat diakses publik. Kehadiran teknologi di ranah hukum diharapkan mampu membantu meringankan pekerjaan yang selama ini dikerjakan secara manual.

Penerapan teknologi dalam proses pencatatan registrasi perkara, pengetikan naskah putusan, dan pengiriman berkas perkara, upaya tersebut antara lain :

*a. Kinerja Meja Informasi.*

Dalam perkembangannya, Pengadilan Negeri Sungailiat mengintegrasikan teknologi informasi dan kebutuhan publik atas informasi melalui penyediaan meja informasi. Sebagai realisasinya, Pengadilan Negeri Sungailiat membuka meja informasi, yang disediakan bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan penanganan perkara dan informasi lain dari pengadilan. Selama setahun terakhir, upaya membuka meja informasi di

Pengadilan Negeri Sungailiat terus dikembangkan. Layanan ini berbasis teknologi informasi online sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Adapun informasi yang disediakan di layanan meja informasi ini adalah informasi perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Penyediaan meja informasi merupakan langkah pembaruan yang memberikan dampak positif dalam beberapa hal, antara lain:

1. Memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim maupun panitera;
2. Memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan;
3. Menekan biaya, karena *situs web* Pengadilan Negeri Sungailiat bisa diakses darimana saja.
4. Memberikan pelayanan terbaik bagi pencari keadilan

***b. Kinerja Penyediaan web site.***

Bagi para pencari keadilan dan masyarakat yang kesulitan untuk datang langsung ke meja informasi di pengadilan mereka dapat meperoleh informasi yang dibutuhkan melalui *situs web* Pengadilan Negeri Sungailiat yaitu [www.pn-sungailiat.go.id](http://www.pn-sungailiat.go.id) atau [sipp.pn-sungailiat.go.id](http://sipp.pn-sungailiat.go.id)

### **SASARAN STRATEGIS 3 MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Pada sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tertib administrasi perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sungailiat. Peningkatan tertib administrasi perkara ini di Pengadilan Negeri Sungailiat direalisasikan dengan menggunakan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini yang meliputi yaitu, **persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap**; **Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis**; **Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak**; **Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat**; **Ratio majelis Hakim terhadap perkara**.

Indikator tersebut menunjukkan *out come* dari kegiatan bimbingan dalam pelayanan penyelesaian perkara dan pembinaan para tenaga teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya oleh Pengadilan Negeri Sungailiat.

Semakin banyak berkas perkara yang dikembalikan ke pengadilan pengaju mengindikasikan pembinaan SDM terkait belum berjalan secara maksimal dalam mendukung pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pencari keadilan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)
		2020 %	2020 Jml (Pkr) %			
1	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100

**Table 35 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

**Penjelasan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Posbakum atau yang lebih dikenal dengan Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa informasi, konsultasi, dan advokasi hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :

1. penggugat/pemohon; atau
2. tergugat/termohon; atau
3. terdakwa; atau
4. saksi.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advokasi hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

No	Bulan	Pidana	Perdata
1	Februari	4	4
2	Maret	17	7
3	April	10	3
4	Mei	10	2
4	Juni	16	-
5	Juli	4	2
6	Agustus	-	6
7	September	-	6
8	Oktober	-	6
9	November	-	6
10	Desember	-	4
JUMLAH		61	46

**Table 36 Perkara Posbankum**

Termin	Bulan	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Jam Layanan Dalam Satu Hari	Jumlah Jam Layanan Dalam Satu Bulan	Persentase	Biaya
1	Februari	12	3	36	8,18	3.518.182
2	Maret	21	1	21	4,77	2.052.273
3	April	21	2	42	9,55	4.104.545
4	Mei	14	2	28	6,36	2.736.364
5	Juni	21	2	42	9,55	4.104.545
6	Juli	22	2	44	10,00	4.300.000
7	Agustus	19	3	57	12,95	5.570.455
8	September	22	2	44	10,00	4.300.000
9	Oktober	21	2	42	9,55	4.105.545
10	November	21	2	42	9,55	4.105.545
11	Desember	21	2	42	9,55	4.105.545
<b>Jumlah</b>		<b>215</b>		<b>440</b>	<b>100,00</b>	<b>43.000.000</b>

*Table 37 Jam Layanan Posbankum*

Jumlah yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2020 adalah sebanyak 107 perkara

Jml pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layan bantuan hukum X 100  
Jml pencari keadilan golongan tertentu

$$\frac{107}{107} \times 100\% \\ =100\%$$

**Capaian kinerja pada indikator ini sebesar :**

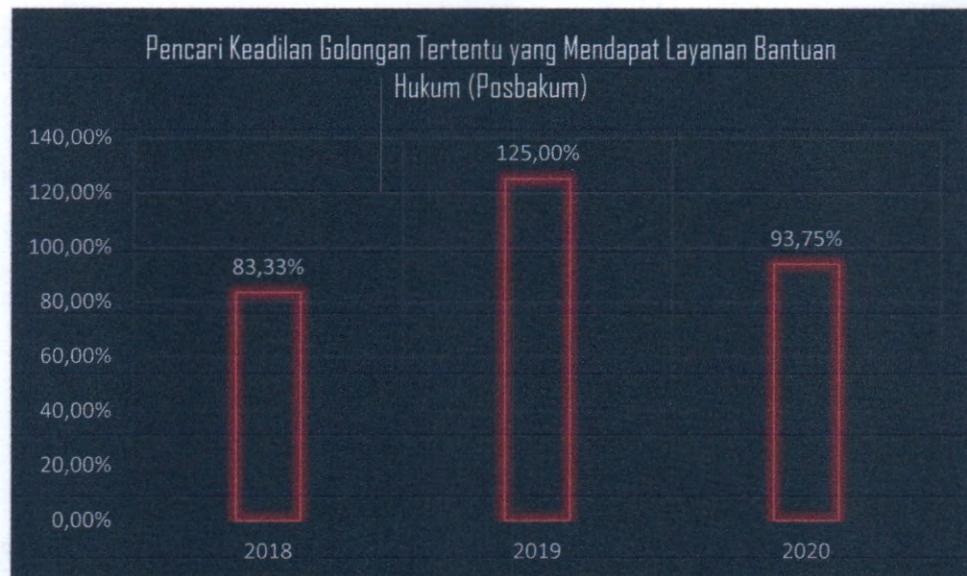
Percentase Jml pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layan bantuan hukum X 100  
Target

$$\frac{100}{100} \times 100\% \\ =100\%$$

**Pencapaian kinerja dari tahun 2018 s/d 2020**

Indikator Kinerja	Target 2019 %	Realisasi 2020 Jml	Realisasi 2020 %	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)
<i>Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</i>	100	107	100	100	100	100

*Table 38 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum tahun 2018 s/d 2020*



**Gbr. 13 Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2018 s/d 2020**

#### **SASARAN STRATEGIS 4 MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**

Pada sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator, untuk mewujudkan sasaran tersebut.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2020 %	Realisasi 2020 Jml (Pkr)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)
Percentase permohonan putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	40	3	37.5	93.75

**Table 39 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan jumlah permohonan eksekusi tersebut yang berhasil ditindaklanjuti.

Jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2020 sebanyak 8 perkara, dengan yang berhasil ditindaklanjuti sejumlah 3 perkara.

$$\begin{aligned}
 & \text{Putusan perkara yang ditindaklanjuti} \times 100\% \\
 & \text{Jml putusan perkara yang sudah BHT} \\
 & \underline{3} \times 100\% \\
 & \underline{8} \\
 & = \underline{\underline{37.5\%}}
 \end{aligned}$$

Capaian kinerja pada indikator ini sebesar **37.5 % / 40 % = 93.75 %**

$$\begin{aligned}
 & \text{Percentase Jml putusan perkara yang ditindaklanjuti} \times 100\% \\
 & \text{Target} \\
 & \underline{37.5} \times 100\% \\
 & \underline{40} \\
 & = \underline{\underline{93.75\%}}
 \end{aligned}$$

Capaian kinerja dari tahun 2018 s/d 2020

Indikator Kinerja	Target 2020 %	Realisasi 2020		Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)
		Jml (Pkr)	%			
Percentase permohonan putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	40	3	50	93.75	125	83.33

*Table 40 Pencapaian Indikator Persentase Permohonan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)  
Tahun 2018 s/d 2020*



*Gbr. 14 Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Persentase Permohonan Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2018 s/d 2020*

- Berdasarkan dari grafik diatas pada tahun **2018** sebesar **83.33%**, pada tahun **2019** sebesar **125 %** dan pada tahun **2020** sebesar **93.75%** hal ini menunjukkan bahwa pencapaian permohonan putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) stabil.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi pencapaian kinerja pada indikator ini, adalah:

1. Adanya permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap nomor perkara I/Pdt.G/2015/PN Sgl yang belum ditindaklanjuti dikarenakan tahap mediasi para pihak tidak berhasil dan untuk tahap pelaksanaannya masih menunggu balasan surat dari PU untuk menanyakan dampak pembongkaran yang disurati tanggal 17 April 2020.
2. Dikarenakan pandemi korona sehingga ada beberapa perkara yang dimohonkan eksekusi prosesnya terhenti namun sudah menyurati pihak terkait mengenai kondisi saat ini dan jika kondisi sudah memungkinkan proses dilanjutkan.

## A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Revisi dan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

### I) REVISI ANGGARAN

No.	DIPA	Program	Pagu Anggaran Awal (Rp.)	Pagu Anggaran Revisi (Rp.)
1	01	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	7.214.697.000	6.369.770.000
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	25.000.000	25.000.000
2	03	Peningkatan manajemen peradilan umum	323.950.000	206.310.000

Table 41 Anggaran Awal dan Revisi

Berikut disampaikan penjelasan revisi anggaran pada tahun 2020 :

#### • DIPA 099024

Revisi Ke	Tgl Revisi	Alasan Revisi	Anggaran		Kewenangan
			Semula	Menjadi	
1	20 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA</li><li>• Adanya Revisi PDK</li></ul>	7.239.697.000	7.239.697.000	KANWIL
2	02 Oktober 2020	Pergeseran Belanja Pegawai pada 258 Satker untuk pemenuhan belanja tunjangan khusus/kegiatan/kinerja pada BUA MA RI	7.239.697.000	6.415.013.000	DJA
3	21 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA</li><li>• Adanya Revisi PDK</li></ul>	6.415.013.000	6.415.013.000	KANWIL

4	27 November 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya Revisi DIPA antar Satker dikarenakan adanya Pagu Minus dan Pemenuhan Kebutuhan Belanja pegawai pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung</li> <li>Perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA</li> <li>Adanya Revisi POK</li> </ul>	6.415.013.000	6.394.770.000	KANWIL DJPBN
5	17 Desember 2020	Rev Pemutakhiran Data	6394770000	6394770000	KANWIL DJPBN

**Table 42 Revisi Anggaran DIPA 099024**

• **DIPA 099235**

Revisi Ke	Tgl Revisi	Alasan Revisi	Anggaran		Kewenangan
			Semula	Menjadi	
1	28 April 2020	Adanya Penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga TA 2020	323.950.000	206.310.000	DJA
2	18 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA</li> <li>Adanya Revisi POK</li> </ul>	206.310.000	206.310.000	KANWIL
3	27 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA</li> <li>Adanya Revisi POK</li> </ul>	206.310.000	206.310.000	KANWIL
4	21 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA</li> <li>Adanya Revisi POK</li> </ul>	206.310.000	206.310.000	KANWIL DJPBN
5	17 Desember 2020	Rev Pemutakhiran Data	206.310.000	206.310.000	KANWIL DJPBN

**Table 43 Revisi Anggaran DIPA 099235**

**2) REALISASI ANGGARAN**

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2020 :

No.	DIPA	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
1	01	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	6.369.770.000	6.322.686.723	99.26
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	25.000.000	25.000.000	100
2	03	Peningkatan manajemen peradilan umum	206.310.000	204.944.499	99.34

**Table 44 Realisasi Anggaran Tahun 2020**

## REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

DIPA 099024		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
KETERANGAN						
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung		Rp 6.369.770.000	Rp 6.322.687.037	99,26	Rp 47.082.963	0,739
001 Gaji dan Tunjangan		Rp 4.759.858.000	Rp 4.718.377.131	99,13	Rp 41.480.869	0,871
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan		Rp 4.759.858.000	Rp 4.718.377.131	99,13	Rp 41.480.869	0,871
511111 Belanja Gaji Pokok PNS		Rp 1.675.542.000	Rp 1.669.776.160	99,66	Rp 5.765.840	0,344
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS		Rp 25.000	Rp 24.339	97,36	Rp 661	2,644
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		Rp 132.761.000	Rp 131.733.442	99,23	Rp 1.027.558	0,774
511122 Belanja Tunj. Anak PNS		Rp 40.529.000	Rp 40.282.452	99,39	Rp 246.548	0,608
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS		Rp 36.400.000	Rp 36.400.000	100	Rp -	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS		Rp 2.022.722.000	Rp 2.012.865.000	99,51	Rp 9.857.000	0,487
511125 Belanja Tunj. PPh PNS		Rp 261.517.000	Rp 252.636.358	96,6	Rp 8.880.642	3,396
511126 Belanja Tunj. Beras PNS		Rp 94.073.000	Rp 93.349.380	99,23	Rp 723.620	0,769
511129 Belanja Uang Makan PNS		Rp 304.105.000	Rp 301.425.000	99,12	Rp 2.680.000	0,881
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS		Rp 13.984.000	Rp 11.135.000	79,63	Rp 2.849.000	20,37
511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim		Rp 178.200.000	Rp 168.750.000	94,7	Rp 9.450.000	5,303
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Rp 1.609.912.000	Rp 1.604.309.906	99,65	Rp 5.602.094	0,348
A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		Rp 478.615.000	Rp 478.217.925	99,92	Rp 397.075	0,083
521111 Belanja Keperluan Perkantoran		Rp 368.300.000	Rp 368.202.025	99,97	Rp 97.975	0,027
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya		Rp 38.795.000	Rp 38.497.100	99,23	Rp 297.900	0,768
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		Rp 71.520.000	Rp 71.518.800	100	Rp 1.200	0,002
B LANGGANAN DAYA DAN JASA		Rp 390.760.000	Rp 386.410.562	98,89	Rp 4.349.438	1,113
521111 Belanja Keperluan Perkantoran		Rp 182.500.000	Rp 181.832.997	99,63	Rp 667.003	0,365
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		Rp 6.000.000	Rp 5.574.000	92,9	Rp 426.000	7,1
522111 Beban Langganan Listrik		Rp 189.600.000	Rp 186.849.861	98,55	Rp 2.750.139	1,45
522112 Beban Langganan Telepon		Rp 2.160.000	Rp 2.010.704	93,09	Rp 149.296	6,912
522113 Beban Langganan Air		Rp 10.500.000	Rp 10.143.000	96,6	Rp 357.000	3,4
C PEMELIHARAAN KANTOR		Rp 539.305.000	Rp 538.578.619	99,87	Rp 726.381	0,135
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		Rp 283.854.000	Rp 283.851.500	100	Rp 2.500	9E-04
523114 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19		Rp 4.408.000	Rp 4.400.000	99,82	Rp 8.000	0,181
523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya		Rp 55.200.000	Rp 55.159.680	99,93	Rp 40.320	0,073
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Rp 195.843.000	Rp 195.167.439	99,66	Rp 675.561	0,345

D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	Rp 83.014.000	Rp 83.014.000	100	Rp -	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 57.960.000	Rp 57.960.000	100	Rp -	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp 25.054.000	Rp 25.054.000	100	Rp -	0
F RAPAT KOORDINASI INTERNAL	Rp 19.200.000	Rp 19.190.000	99,95	Rp 10.000	0,052
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp 19.200.000	Rp 19.190.000	99,95	Rp 10.000	0,052
G KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING	Rp 13.440.000	Rp 13.370.000	99,48	Rp 70.000	0,521
524111 Belanja Perjalanan Biasa	Rp 13.440.000	Rp 13.370.000	99,48	Rp 70.000	0,521
H KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL/DJPBN	Rp 9.180.000	Rp 9.180.000	100	Rp -	0
524111 Belanja Perjalanan Biasa	Rp 9.180.000	Rp 9.180.000	100	Rp -	0
J PENANGGULANGAN COVID 19	Rp 76.398.000	Rp 76.348.800	99,94	Rp 49.200	0,064
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 76.398.000	Rp 76.348.800	99,94	Rp 49.200	0,064
<b>02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</b>	<b>Rp 25.000.000</b>	<b>Rp 25.000.000</b>	<b>100</b>	<b>Rp -</b>	<b>0</b>
<b>052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi</b>	<b>Rp 25.000.000</b>	<b>Rp 25.000.000</b>	<b>100</b>	<b>Rp -</b>	<b>0</b>
<b>A Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan</b>	<b>Rp 25.000.000</b>	<b>Rp 25.000.000</b>	<b>100</b>	<b>Rp -</b>	<b>0</b>
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	100	Rp -	0

Table 45 Detail Realisasi Anggaran Tahun 2020 DIPA 099024

DIPA 099235						
KETERANGAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	%	
07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 206.310.000	Rp 204.944.499	99,34	Rp 1.365.501	0,66	
1049.003 Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp 44.000.000	Rp 43.989.999	99,98	Rp 10.001	0,02	
051 Pos Bantuan Hukum	Rp 44.000.000	Rp 43.989.999	99,98	Rp 10.001	0,02	
522131 Beban Jasa Konsultan	Rp 44.000.000	Rp 43.989.999	99,98	Rp 10.001	0,02	
1049.005 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	Rp 162.310.000	Rp 160.954.500	99,16	Rp 1.355.500	0,84	
051 Pendaftaran berkas perkara	Rp 106.975.000	Rp 106.975.000	100,00	Rp -	0,00	
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp 106.975.000	Rp 106.975.000	100,00	Rp -	0,00	
052 Penetapan hari sidang	Rp 6.320.000	Rp 5.694.000	90,09	Rp 626.000	9,91	
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 4.200.000	Rp 3.694.000	87,95	Rp 506.000	12,05	

524111 Belanja Perjalanan Biasa	Rp 2.120.000	Rp 2.000.000	94,34	Rp 120.000	5,66
053 Pemeriksaan di sidang pengadilan	Rp 20.040.000	Rp 20.020.000	99,90	Rp 20.000	0,10
521211 Belanja Bahan	Rp 20.040.000	Rp 20.020.000	99,90	Rp 20.000	0,10
054 Minutasi dan Upaya Hukum	Rp 50.000	Rp 50.000	100,00	Rp -	0,00
521211 Belanja Bahan	Rp 50.000	Rp 50.000	100,00	Rp -	0,00
055 Pengiriman petikan / salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa	Rp 10.760.000	Rp 10.758.000	99,98	Rp 2.000	0,02
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 4.760.000	Rp 4.758.000	99,96	Rp 2.000	0,04
524111 Belanja Perjalanan Biasa	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	100,00	Rp -	0,00
056 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Rp 6.560.000	Rp 6.347.000	96,75	Rp 213.000	3,25
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 1.260.000	Rp 1.117.000	88,65	Rp 143.000	11,35
524111 Belanja Perjalanan Biasa	Rp 5.300.000	Rp 5.230.000	98,68	Rp 70.000	1,32
057 Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama	Rp 6.665.000	Rp 6.319.000	94,81	Rp 346.000	5,19
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 1.475.000	Rp 1.129.000	76,54	Rp 346.000	23,46
524111 Belanja Perjalanan Biasa	Rp 4.770.000	Rp 4.770.000	100,00	Rp -	0,00
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	Rp 420.000	Rp 420.000	100,00	Rp -	0,00
058 Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di pengadilan tingkat pertama	Rp 4.940.000	Rp 4.791.500	96,99	Rp 148.500	3,01
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 910.000	Rp 761.500	83,68	Rp 148.500	16,32
524111 Belanja Perjalanan Biasa	Rp 3.470.000	Rp 3.470.000	100,00	Rp -	0,00
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	Rp 560.000	Rp 560.000	100,00	Rp -	0,00

Table 46 Detail Realisasi Anggaran Tahun 2020 DIPA 099235

# BAB IV PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program ataupun sasaran Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaanya. Namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu di tingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan, hambatan serta cara pemecahan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain:

- a. Bertambahnya Sarana dan Prasarana penunjang operasional kantor;
- b. Meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- c. Adanya komitmen dari seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Sungailiat untuk menjalankan tugas dengan baik.
- d. Mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)
- e. Mendapatkan peringkat pertama dalam penilaian evaluasi implementasi SIPP tahun 2020 dalam kategori 501 s/d 1000 perkara
- f. Berhasil mempertahankan akreditasi dengan nilai A Excellent

### 2) Hambatan/masalah

Beberapa hambatan/ masalah yang masih di hadapi antara lain:

- a. Mengingat situasi keuangan pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang di alokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud;
- b. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaanya.
- c. Adanya pandemic covid-19 yang menghambat jalannya persidangan dan kegiatan lainnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2020 ini melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) selama tahun 2020 sebagai tahun pertama Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2020-2024 yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabel, karena Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020.

Sebagai kawal depan (*Voor Post*) Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sungailiat bertekad mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan peradilan tersebut secara berkesinambungan dan ditingkatkan untuk mengejawantahkan visi misi Pengadilan Negeri Sungailiat. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Sungailiat. Menganalisis kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2020 maka diharapkan ada suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja peradilan.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja.

## **B. SARAN**

Sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dihubungkan dengan kenyataan tugas pokok visi dan misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Agar implementasi LKjIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
- b. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
- c. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

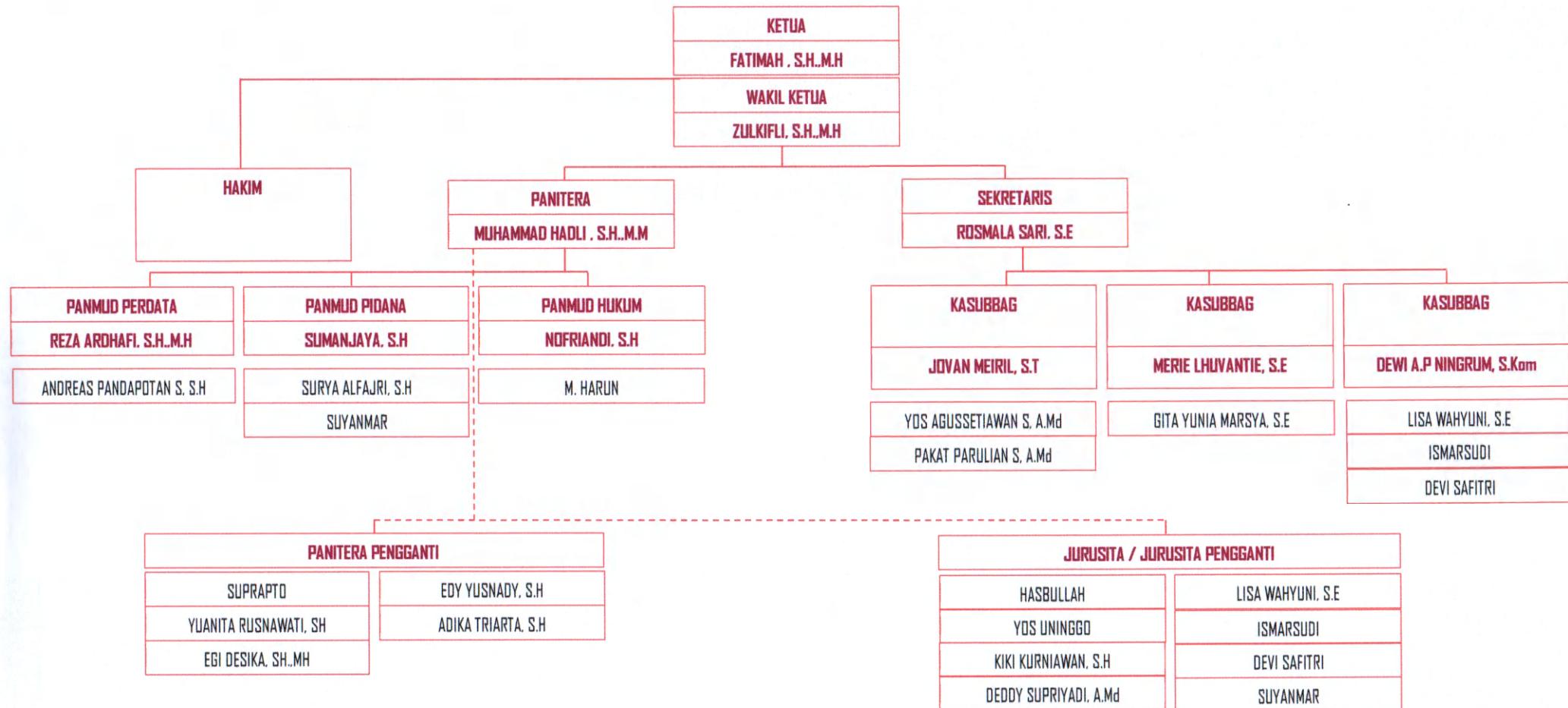


PENGADILAN NEGERI  
SUNGAILIAT

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020



## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT KELAS I B



**Ket :**

**a. Hakim**

Adapun Hakim di Pengadilan Negeri Sungailiat (data bulan Desember 2020) berjumlah 12 Orang dengan data sebagai berikut :

1. Fatimah, S.H., M.H (Ketua)
2. Zulkifli, S.H., M.H
3. Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.
4. Benny Yoga Dharma, S.H
5. Dewi Sulistiariini, S.H
6. Joni Mauluddin Saputra, S.H
7. Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H
8. Firman Jaya, S.H

**b. Kepaniteraan**

- 1) Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum .

1. M. Hadli , S.H., M.M (Panitera)
2. Reza Ardhafi, S.H., M.H (Panitera Muda Perdata)
3. Egi Desika, S.H (Plt. Panitera Muda Pidana)
4. Nofriandi, S.H (Panitera Muda Hukum)

- 2) Panitera Pengganti

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat berjumlah 4 (empat) orang, dengan data sebagai berikut:

1. Suprapto, S.H
2. Yuanita Rusnawati, S.H
3. Egi Desika, S.H
4. Edy Yusniadi, S.H
5. Adika Triarta, S.H

- 3) Jurusita

Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungailiat berjumlah 4 (empat) orang dengan data sebagai berikut:

1. Hasbullah
2. Yos Uninggo
3. Kiki Kurniawan
4. Deddy Supriyadi, A.md

- 4) Jurusita Pengganti

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat berjumlah 8 (delapan) orang dengan data sebagai berikut:

1. Lisa Wahyuni, S.E (Merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran)

2. Ismarsudi (Merangkap sebagai staf Umum dan Keuangan)
  3. Devi Safitri (Merangkap sebagai staf Umum dan Keuangan)
  4. Suyanmar (Merangkap sebagai staf Kepaniteraan Pidana)
- 5) Staf Kepaniteraan Perdata
- Adapun untuk membantu tugas-tugas pada kepaniteraan perdata adalah sebagai berikut:
1. Andreas Pandapotan S. S.H
- 6) Staf Kepaniteraan Pidana
- Adapun untuk membantu tugas-tugas pada kepaniteraan pidana adalah sebagai berikut :
1. Surya Al Fajri, S.HI
  2. Suyanmar (Merangkap JSP)
- 7) Staf Kepaniteraan Hukum
- Adapun untuk membantu tugas-tugas pada kepaniteraan hukum adalah sebagai berikut :
1. Muhammad Harun

**c. Kesekretariatan**

Dalam upaya mendukung tugas-tugas kesekretariatan telah dibentuk sistematika organisatoris yang dikoordinir oleh Sekretaris yang selanjutnya dibantu 3 (tiga ) orang Kasubbag yang terbagi atas Sub Bagian Umum dan Keuangan Sub Bagian Kepegawaian dan DRTALA serta Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dengan susunan sebagai berikut :

1. Rosmala Sari, S.E (Sekretaris)
2. Dewi Aprilia Puspita N. S.Kom (Kasubbag Umum dan Keuangan)
3. Merie Lhuvantie, S.E (Kasubbag Kepegawaian dan DRTALA)
4. Jovan Meiril, S.T (Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)

Staff :

1) Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan

Adapun untuk membantu tugas-tugas di Bagian Umum dan Keuangan ditugaskan staf-staf dengan data sebagai berikut:

1. Lisa Wahyuni, S.E (Merangkap sebagai JSP)
2. Ismarsudi (Merangkap sebagai JSP)
3. Devi Safitri (Merangkap sebagai JSP)

2) Staf Sub Bagian Kepegawaian dan DRTALA

Adapun pelaksana tugas-tugas pengelolaan kepegawaian pada Pengadilan Negeri Sungailiat dilaksanakan oleh staf-staf dengan data sebagai berikut:

1. Gita Yunia Marsya, S.E

3) Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

---

Adapun pelaksana tugas-tugas pengelolaan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dilaksanakan oleh satu orang staf sebagai berikut :

1. Yos Agussetiawan S. A.Md
2. Pakkat Parulian S. A.Md

**WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

<b>KABUPATEN BANGKA</b>		
<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>
1.	Sungailiat	a. Sungailiat b. Parit Padang c. Sri Menanti d. Kuday e. Sinar Jaya f. Kenanga g. Rebo
2.	Pemali	a. Karya Makmur b. Air Ruai c. Air Duren d. Keceper e. Penyamun f. Mentabat g. Tutut h. Sempang
3.	Merawang	a. Air Anyir b. Jurung c. Batu Rusa d. Merawang e. Riding Panjang f. Dwi Makmur g. Kimak h. Balun Ijuk i. Pagarawan j. Jada Bahrin
4.	Puding Besar	a. Puding Besar b. Kayu Besi c. Labu d. Nibung e. Saing f. Tanah Bawah g. Sungai Dua h. Kota Waringin
5.	Mendo Barat	a. Zed b. Kemuja c. Kace d. Cengkong Abang e. Air Duren f. Petaling g. Air Buluh h. Labuh Air Pandan i. Mendo j. Paya Benua k. Kota Kapur l. Penagan

		m.	Rukem
6.	Bakam	a.	Bakam
		b.	Dalil
		c.	Mabat
		d.	Maras Senang
		e.	Neknang
		f.	Bukit Layang
		g.	Kapuk
		h.	Nangka
		i.	Tiang Tara
7.	Riau Silip	a.	Riau
		b.	Silip
		c.	Cit
		d.	Deniang
		e.	Pugul
		f.	Bedukar
		g.	Air Antu
		h.	KD Mentok
		i.	Pangkal Niur
		j.	Banyu Asin
		k.	Bernai
		l.	Berbura
		m.	Rambang
		n.	Tuing
		o.	Mapur
		p.	Kelaga
8.	Belinyu	a.	Riding Panjang
		b.	Gunung Muda
		c.	Lumut
		d.	Bukit Ketok
		e.	Kuto Panji
		f.	Air Jukung
		g.	Romodong
		h.	Tanjun Gudang
		i.	Pejam
		j.	Pesaren
		k.	Gunung Pelawan
		l.	Sungakai
		m.	Bintet
		n.	Bubus
		o.	Kundi

#### KABUPATEN BANGKA SELATAN

No.	Kecamatan	Kelurahan	
1.	Air Gegas	a.	Air Gegas
		b.	Air Bara
		c.	Bencah
		d.	Nangka
		e.	Pergam
		f.	Sidoharjo

		g. Delas
		h. Nyelanding
		i. Ranggas
		j. Tepus
2.	Payung	a. Payung
		b. Bedengung
		c. Malik
		d. Paku
		e. Ranggang
		f. Pangkal Buluh
		g. Irat
		h. Nadung
		i. Sengir
3.	Simpang Rimba	a. Simpang Rimba
		b. Gudang
		c. Jelutung II
		d. Sebagin
		e. Bangka Kota
4.	Toboali	a. Toboali
		b. Bikang
		c. Jeriji
		d. Kepoh
		e. Rindik
		f. Teladan
		g. Tanjung Ketapang
		h. Gadung
		i. Kaposang
		j. Rias
		k. Serdang
5.	Pulau Besar	a. Batu Betumpang
		b. Fajar Indah
		c. Panca Tunggal
		d. Sumber Jaya Permai
		e. Suka Jaya
		f. Trans
6.	Tukak Sadai	a. Bukit Ketap
		b. Tukak
		c. Sadai
		d. Pasir Putih
		e. Tiram
7.	Lepar Pongok	a. Kumbung
		b. Tanjung Sangkar
		c. Pongok
		d. Penutuk
		e. Tanjung Labu
		f. Teluk Limau
		g. Celagen